



Iis Husnul Hotimah¹
 Rermiyati Yunus²
 Ismaul Fitroh²

ANALISIS NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME ETNIS DAN AGAMA PADA MATERI-MATERI DALAM BUKU TEKS SEJARAH SMA TERBUKA KELAS X DAN XI

Abstrak

Tulisan ini menyoroti bagaimana nilai-nilai multikulturalisme etnis dan agama tergambar dengan baik dalam buku teks sejarah SMA. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena pendidikan harus merepresentasikan budaya peserta didik khususnya dalam pembelajaran sejarah. Selain dalam pembelajaran, multikulturalisme etnis dan budaya juga harus tergambar dengan baik dalam sumber bacaan dan belajar siswa yaitu buku teks. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah analisis konten dengan indikator yang sudah dikembangkan oleh penulis berdasarkan pada aturan penulisan buku teks menurut beberapa ahli. Selain itu indikator mengenai multikulturalisme juga dikembangkan berdasarkan teori dari beberapa ahli. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua tema dalam buku teks mengandung nilai-nilai atau unsur multikulturalisme etnis dan agama. Selain itu pada buku teks yang dianalisis tidak terdapat nilai-nilai multikulturalisme dari tokoh-tokoh sejarah. Nilai-nilai multikulturalisme seperti salah satunya toleransi sudah seharusnya tergambar dengan jelas dalam buku teks dan dalam pembelajaran sejarah, karena peserta didik hidup dilingkungan yang secara etnis maupun agama beragam.

Kata Kunci: Buku Teks Sejarah, Pembelajaran Sejarah, Multikulturalisme

Abstract

This paper highlights about how the values of ethnic and religious multiculturalism are well depicted in high school history textbooks. This is important to analyze because education must represent the culture of students, especially in history learning. In addition to learning, ethnic and cultural multiculturalism must also be well illustrated in students' reading and learning resources, namely textbooks. The method used in this paper is content analysis with indicators that have been developed by the author based on the rules of textbook writing according to several experts. In addition, indicators regarding multiculturalism were also developed based on the theories of several experts. The analysis shows that not all themes in the textbooks contain values or elements of ethnic and religious multiculturalism. In addition, the textbooks analyzed did not contain multiculturalism values from historical figures. Multiculturalism values such as tolerance should be clearly illustrated in textbooks and in history learning, because students live in an environment that is ethnically and religiously diverse.

Keywords: History Text Book, Historical Learning, Multiculturalism

PENDAHULUAN

Pendidikan khususnya di Indonesia haruslah berakar pada budaya, begitu pula dengan pembelajaran sejarah karena pada akhirnya peserta didik akan hidup dilingkungan budayanya, maka pembelajaran harus pula mempersiapkan peserta didik untuk hidup dilingkungan budayanya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya yang kompleks. Jika dihubungkan dengan pengajaran sejarah, Wineburg (2000, hlm. 310) mengungkapkan bahwa “each of us grows up in a home with a distinct history and a distinct perspective on the meaning of larger historical events...the stories of ethnic, racial and religious groups, mold both our collective and our individual historical sense”. Maka dari itu, pembelajaran sejarah dimasa sekarang harus berdasarkan keragaman budaya indonesia, dari segi

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
 email: husnuliis@ung.ac.id, ismaulfitroh@ung.ac.id

pengajaran maupun instrumen-instrumennya termasuk buku teks juga harus memperhatikan keanekaragaman budaya Indonesia. Sehingga pembelajaran sejarah dapat ikut berkontribusi dalam memperkuat jati diri bangsa.

Ketika berbicara mengenai buku teks apalagi buku teks sejarah, hal yang paling diingat oleh kebanyakan siswa ialah membosankan dan penuh dengan fakta yang tidak menarik. Buku teks memang seakan menjadi salah satu masalah dalam pembelajaran sejarah yang hingga kini masih sering diperbincangkan. Bukan hanya di Indonesia tapi juga diberbagai belahan dunia lainnya. hal ini merupakan hal yang wajar mengingat bahwa pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang sulit dipahami siswa karena objek kajiannya berada dimasa lalu. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa buku teks pembelajaran sejarah harus memenuhi beberapa kriteria sebelum diterbitkan dan dipakai oleh siswa, tujuannya tentu saja agar dapat menjadi sumber belajar sekaligus media belajar yang dapat membantu siswa mencapai pemahaman. Namun disamping itu semua, terdapat kriteria lainnya yang harus dipenuhi buku teks sejarah untuk memenuhi kebutuhan zaman yang semakin berkembang. Salah satu isu yang sangat marak saat ini diperbincangkan ialah isu mengenai multikulturalisme, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kemultikulturalan Indonesia dilatar belakangi oleh beragamnya budaya dan agama yang terebar diseluruh wilayah Indonesia, dimana hal tersebut bisa menguntungkan ataupun menjadi boomerang bagi indonesia sendiri. Horton, (2001, hlm. 2) menyebutkan bahwa multikulturalisme memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi multikulturalisme dpandang sebagai suatu masalah, namun disisi lain multikulturalisme juga digunakan secara evaluatif untuk mengekspresikan sesuatu yang ideal. Masyarakat multikultural menurut Horton adalah tujuan yang sangat berharga untuk mengarahkan kebijakan negara. Multikulturalisme menjadi masalah ketika konflik antar kelompok tentang nilai-nilai atau interpretasinya tidak dapat diakomodasikan dengan nyaman dalam struktur sosial tertentu. Sehingga kelompok-kelompok tersebut merasa tidak dianggap sebagai bagian dari suatu negara.

Hal ini lah yang sekarang sedang dihadapi oleh negara kita dimana konflik mengenai ras dan agama seakan marak terjadi dan menjadi urgent issue yang harus segera diatasi. Pembelajaran sejarah beserta buku teks sejarah menjadi salah satu solusi akan masalah ini. Selain harus memenuhi kriteria-kriteria yang menurut Sjamsuddin terdapat 6 kriteria buku teks sejarah, (2000, hlm. 5), buku teks sejarah juga dituntut harus mengandung nilai-nilai multikulturalisme karena menurut Saripudin & Komalasari (2016, hlm. 827) buku teks sejarah adalah sumber utama pembelajaran bagi siswa yang diharapkan memiliki nilai didaktik-edukatif untuk pembentukan identitas nasional dan kemampuan untuk menyatukan pengalaman kolektif bangsa multikultural. Selain itu buku teks juga akan mempengaruhi pola pikir siswa terhadap suatu isu sehingga dirasa perlu dan penting untuk dimunculkan nilai-nilai multikulturalisme dalam buku teks sejarah. Makalah ini akan mencoba untuk menganalisis buku teks sejarah di SMA Terbuka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hal tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis konten dengan pisau analisis berupa indikator-indikator yang mencirikan adanya muatan nilai-nilai multikulturalisme dalam buku teks. Data diperoleh dari hasil analisis konten serta hasil dari studi literature berupa buku, artikel ilmiah dan studi terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Multikulturalisme

Kondisi sosial masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Ini bermakna bahwa apa yang terjadi dalam suatu masyarakat bisa juga terjadi dalam dunia pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Pada saat sekarang ini dunia pendidikan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, baik persoalan yang berasal dari dunia pendidikan sendiri seperti masih rendahnya kualitas pendidikan, kenakalan pelajar sampai kepada permasalahan yang berasal dari masyarakat, yakni konflik dan kekerasan yang terjadi dimasyarakat. Kekerasan yang terjadi baik dalam skala kecil, tingkat lingkungan, desa, bahkan antaraetnis masih saja terjadi di sekitar lingkungan masyarakat kita. Sejak bergulirnya reformasi sampai saat ini, tercatat banyak terjadi kasus konflik dan kekerasan. Mulai dari konflik agama yang merenggut

ribuan korban di Ambon. Menyusul tahun 2001, tragedi berdarah antara etnis Madura dengan suku Dayak, penyerangan kelompok Syi'ah di Sampang tahun 2012, dan yang paling baru adalah konflik yang terjadi di Wamena Papua yang terjadi bulan September 2019. Walaupun pemerintah menyebut tragedi ini bukan konflik etnis, namun masyarakat Papua menyebut bahwa pemicunya adalah isu berbau rasis, dan akibat dari konflik ini merenggut nyawa etnis pendatang.

Banyaknya fenomena kekerasan yang terjadi maka dibutuhkan penyelesaian dari berbagai sisi, termasuk dunia pendidikan. Dunia Pendidikan berkontribusi lebih luas dalam hal menyelesaikan sebuah konflik ataupun kekerasan karena dapat membangun kesadaran sistematis terhadap pentingnya kehidupan yang damai, Naim dan Sauqi (2011, hlm. 14-15). Oleh karena itu, sistem pendidikan adalah hal yang paling mendasar yang wajib dibangun dengan melihat kondisi masyarakat dan dibangun untuk menyelesaikan amanah masyarakat.

Tingkat keragaman yang tinggi dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Artinya, Indonesia merupakan negara bangsa yang multikultur. Sehingga struktur masyarakat yang terbentuk cukup unik. Secara horizontal, ditandai dengan adanya masyarakat yang terdiri atas kesatuan-kesatuan sosial dengan perbedaan adat istiadat, agama dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan perbedaan yang tajam antara lapisan bawah dan lapisan atas dalam masyarakat. Rustanto (2015, hlm. 33). Keadaan masyarakat seperti ini jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan kemultikulturalan itu sendiri tentu akan berakibat pada gesekan-gesekan yang tidak berkesudahan seperti yang telah dialami bangsa ini dimasa lalu. Dalam hal ini pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang mengapa berbeda, dan mengapa perbedaan itu bisa terjadi. Artinya seluruh aspek perbedaan itu harus diketahui, selanjutnya untuk dipahami bagaimana perbedaan itu bisa diikat dalam bingkai kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya.

Identitas lokal tidak bisa diungkapkan secara bebas pada masa Orde Baru hal ini dikarenakan hanya kebudayaan nasional yang ada dalam sistem pendidikan. Mahfud (2016, hlm. xii). Adanya perbedaan suku, agama, budaya dan bahasa ternyata diacuhkan ketika masa Orde Baru. Tidak hanya itu, semboyan "bhineka tunggal ika" yang dianggap sebagai pemersatu bangsa implementasinya tidak seimbang. Dalam pengelolaan negara dalam hal ini adalah bidang pendidikan, ternyata semangat kebhinekaan lebih dominan dibanding kebhinekaannya. Aspek keseragaman dan sentralistis lebih dikembangkan dalam sistem Pendidikan Indonesia. Naim dan Sauqi (2011, hlm.40). Keseragaman yang selama ini ditampilkan ternyata menumbuhkan sikap tidak saling menghargai adanya perbedaan. Menurut Aly (2011, hlm.3). Setidaknya ada 3 indikator yang menunjukkan adanya aspek keseragaman yang mengarah pada penekanan kebhinekaan dari pada kebhinekaan dalam praktik pendidikan Indonesia yaitu seperti penyeragaman metode pembelajaran dan kurikulum, pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralisasi, serta belum adanya proses mengakomodasi dan menghargai adanya perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, etnik, bahasa, maupun agama. Adapun penyeragaman meliputi banyak aspek mulai dari pakaian seragam, metode pembelajaran, hingga buku ajar.

Pakar pendidikan Indonesia mengatakan bahwa kondisi pendidikan yang dijelaskan diatas, tidak relevan untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural dalam banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah transformasi paradigma pendidikan yang awalnya pendidikan monokultural menjadi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menjadi gagasan yang ideal dengan keadaan masyarakat kontemporer yang memiliki budaya sangat beragam saat ini. Unsur yang terkandung dalam pendidikan multikultural yaitu adanya keadilan, keterbukaan, kesetaraan serta pengakuan adanya perbedaan menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia ditengah himpitan budaya global.

Pada dasarnya dalam konteks penyelenggaraan pembelajaran di Indonesia, aspek multikultural tersebut telah mulai memperoleh tempat. Perihal tersebut dapat dilihat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 (Bab III Pasal 4) tentang Sistem Pendidikan nasional, menerangkan jika pembelajaran diselenggarakan secara demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Bisa disimpulkan jika semangat multikulturalisme telah terdapat dalam semangat penyelenggaraan pendidikan. Tetapi tidak cukup hanya dituangkan dalam Undang-

undang saja, melainkan bentuk nyata dari seluruh komponen pendidikan, yang terdiri dari pengambil keputusan, para guru dan tenaga kependidikan di lapangan.

Pendidikan multikultural tidak sebatas ide ataupun paradigma tetapi lebih jauh dari itu jika pendidikan multikultural mempunyai arti yang luas dengan terdapatnya gerakan reformasi pendidikan yang nantinya bisa memberikan kontribusi positif. Pendidikan multikultural ialah pendidikan yang mempunyai strategi serta konsep pembelajaran dengan berlandaskan pada pemanfaatan keragaman yang terdapat di masyarakat, khususnya yang dimiliki oleh peserta didik misalnya keragaman bahasa, agama, etnis, budaya, status sosial, gender dan perbedaan keterampilan ataupun kemampuan. Tidak cuma itu, pembelajaran multikultural bertujuan guna meningkatkan pemahaman peserta didik supaya berperilaku humanis, pluralis, serta demokratis. Mania (2010, Hlm. 81). Oleh sebab itu, pendidikan multikultural bisa diartikan sebagai reformasi pendidikan yang mengedepankan keadilan sosial buat seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang ataupun identitas peserta didik yang bermacam-macam supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Penyelenggaraan pendidikan multikultural bisa dikatakan sukses bila dalam diri peserta didik tercipta perilaku hidup tenggangrasa, tidak berselisih serta tidak terjadi konfrontasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya, suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Mahfud dalam (Sudrajat, 2014, hlm. 87).

Analisis Pentingnya Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Mata Pelajaran Sejarah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki perbedaan etnik, bahasa, agama dan budaya. Namun dibalik itu semua terdapat satu juaan bersama yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran akan persatuan dan memiliki identitas yang kuat. Sehingga diperlukan kerjasama seluruh komponen bangsa di semua sector untuk mencapai kemakmuran bersama. Saling menghargai menjadi kunci hilangnya sekat agama dan budaya. (Rosyada, 2014, hlm 3). Indonesia dan keragaman merupakan satu kesatuan dan sudah menjadi identitas yang dimiliki Indonesia. Keragaman ini harus terus dijaga melalui berbagai cara, termasuk melalui pendidikan. Kurikulum yang merepresentasikan keragaman Indonesia baik dari segi agama maupun budaya sudah berusaha diciptakan oleh pemerintah. Mulyana (2009, hlm. 79) mengungkapkan bahwa pembelajaran sejarah memiliki tujuan untuk pembentukan watak dan penanaman nilai keberagaman. Pengajaran sejarah memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan warga Negara yang memiliki pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa, yang salah satunya merupakan menghargai keberagaman (Lionar, 2017, hlm 64). Selain itu, menurut Joebagio (dalam Garvey, 2015, hlm xi) dalam sebuah pengantar mengatakan bahwa pengajaran sejarah tidak lain ialah merupakan proses internalisasi nilai-nilai berbagai peristiwa penting dimasa lalu seperti asal usul, silsilah, pengalaman kolektif dan keteladanan para tokoh sejarah, sehingga output nya meliputi pemahaman terhadap peristiwa sejarah, meneladani kearifan, dan sikap bijak.

Hasil identifikasi Banks dalam (Ambarudin, 2016, hlm 31-34) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi pendidikan multikultural yang menurut asumsinya dapat membantu pengajar sejarah atau guru dalam mengimplementasikan beberapa hal terkait isu perbedaan, yaitu:

1. Dimensi Integrasi Isi atau Materi (Content Integration)

Integrasi isi atau materi merupakan proses refleksi materi yang berbeda-beda melalui pendeskripsian hal-hal penting dalam pembelajaran. Guru melakukan penggabungan isi materi dengan kurikulum menggunakan beragam cara pandang. Dengan kata lain guru berupaya untuk mengintegrasikan pembelajaran multikultural dalam kurikulum atau bagian dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Yang paling penting disini ialah diperlukan banyak informasi mengenai beberapa etnis dan sudut pandangnya.

2. Dimensi Konstruksi Pengetahuan (Knowledge Constructions)

Dimensi konstruksi pengetahuan mengharuskan pengajar atau guru untuk membantu peserta didik memahami multiperspektif serta membantu peserta didik menyimpulkan berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki.

3. Dimensi Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction)

Dimensi ini merupakan salah satu upaya guru untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan mengenai perbedaan kelompok. Bahan pembelajaran dipilih oleh guru dalam proses ini. Bahan materi harus merepresentasikan perbedaan kelompok. Ketika peserta didik yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda datang ke sekolah, dan cenderung

berperilaku negative dan banyak melakukan kesalahpahaman di lingkungan belajarnya terhadap etnis lain, maka disinilah peran guru dalam memberikan pemahaman mengenai hal tersebut dari sudut pandang kebudayaan yang dimaksud.

4. Dimensi Pendidikan yang Sama/Adil (Equitable Pedagogy)

Dimensi ini secara singkat dapat dijelaskan memiliki tujuan untuk mempermudah siswa mencapai hasil belajar dengan cara mengubah fasilitas pembelajaran. Kerja sama merupakan kunci penting atau strategi utama yang digunakan untuk menerapkan pendidikan secara adil. Persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar dirancang dengan membentuk beberapa hal yaitu membentuk sekolah yang multicultural.

5. Dimensi Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial (Empowering school culture and social structure).

Siswa dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda harus juga diberdayakan di lingkungan sekolah. Hal tersebut juga dapat membantu untuk menyusun struktur sosial (sekolah) dan memanfaatkan potensi latar belakang budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah.

Terdapat dua hal dalam pendidikan multicultural yang perlu ditanamkan melalui pembelajaran sejarah. Yaitu, pendidikan multicultural dalam segi etnis dan agama. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam dua hal ini tidak jarang memicu kenumculan deharmonisasi dalam masyarakat Indonesia. Sekolah, melalui guru yang melakukan pembelajaran, sangat memungkinkan untuk mengkasikan peserta didik yang mengerti dan mampu menghargai serta menghormati bahkan menjaga keberagaman yang dimiliki oleh lingkungan tempat tinggal peserta didik itu sendiri.

Analisis Nilai-Nilai Multikulturalisme pada Materi-materi dalam buku teks sejarah SMA terbuka kelas X

Pendidikan multikultural pada hakekatnya berfokus kepada bagaimana kita menjaga keharmonisan antar etnis maupun agama. Untuk itu dimasa sekarang dirasa sangat penting untuk mempertimbangkan budaya sebagai landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan termasuk dalam kebijakan pendidikan. Dalam bagian ini penulis akan menjabarkan hasil analisis mengenai nilai-nilai multikulturalisme dari segi agama dan etnis dan bagaimana semangat multikulturalisme tersebut dituliskan dalam materi-materi pada bahan ajar sejarah di SMA terbuka yang diterbitkan oleh Pemprov Jabar. Pada bab 2 buku teks sejarah SMA terbuka kelas X, terdapat materi mengenai nenek moyang Bangsa Indonesia. Bagian ini diawali dengan kalimat:

Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, kuliner, kesenian dan masih banyak lainnya. Walaupun negara Indonesia penuh dengan keragaman budaya, suku dan agama Indonesia tetap memiliki satu tujuan yakni menjaga persatuan dan kedaulatan negara ini. Perbedaan dan keragaman yang ada di negara Indonesia ini merupakan tanda akan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, betapa Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya. (Buku Teks Sejarah Indonesia kelas X Halaman 23-24).

Menurut para penulis dari penjelasan diatas, penulis buku mencoba untuk memunculkan nilai multikulturalisme pada materi ini. Penjelasan diatas ingin menegaskan pada siswa bahwa mereka tidak hidup pada kehidupan yang monokultur atau monotheisme, bahwa penting bagi siswa untuk menyadari lingkungannya yang multikultur. Pemahaman ini akan membawa siswa kepada penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan etnis, budaya maupun agama. Namun disayangkan pada bab ini tidak ditemukan lagi kalimat yang mengarah kepada ajakan untuk hidup harmonis dalam perbedaan atau nilai-nilai ultikulturalisme lainnya. Sementara untuk nilai multikulturalisme dalam hal agama, dalam buku ini halaman 43 dalam bab 3 mengenai materi kerajaan Kutai dan Tarumanegara disebutkan bahwa:

Berasal dari Dinasti Tang yang menyebutkan ada seorang pendeta bernama Fa-Hien yang sempat singgah di Tarumanegara. Menurutnya mayoritas beragama Hindu, sedikit beragama Buddha dan ada pemeluk agama kotor (hlm. 43).

Kemudian pada halaman selanjutnya disebutkan bahwa:

Berdasarkan berita dari Fa-Hien dan adanya prasasti yang menyebutkan bahwa Purnawarman adalah titisan Dewa Wisnu, maka dapat di simpulkan kerajaan Tarumanagara

adalah bercorak Hindu, walaupun masyarakatnya ada juga yang menganut agama lain seperti Buddha. (Hlm. 44).

Hadirnya dua agama yaitu (Hindu-Buddha) pada saat itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat menerima perbedaan kepercayaan yang ada disekitarnya. Penerimaan tersebut juga mengarah pada penghargaan terhadap masing-masing agama atau kepercayaan seperti yang terjadi pada masa kerajaan Singhasari, Mataram Kuno, dan Majapahit sinkretisme tersebut melahirkan agama Siwa-Buddha. Jika kita analisis lebih lanjut, kerajaan yang sangat tradisional biasanya memeluk agama yang dianut oleh rajanya, dan sang raja biasanya juga memerintahkan untuk memeluk agama yang sama dengannya. Dalam penjelasan mengenai agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Tarumanegara tersebut, penulis tidak menegaskan bahwa hal ini menandakan bahwa raja membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama diluar agama yang dianut oleh raja dan menerima keberagaman dalam masyarakatnya.

Sementara nilai multikulturalisme lainnya ditemukan pada materi mengenai kerajaan Majapahit. Dalam penjelasannya penulis mendeskripsikan bahwa:

Pada masa majapahit ada tiga agama yang diakui sebagai agama negara, yaitu Agama Siwa (Hindu) yang diurus Dharmadiyaksa Kasaiwan, Buddha yang diurus Dharmadiyaksa Kasogatan. Aliran Karsyan (pertapa) yang diurus Menteri Herhaji., meskipun demikian Masyarakat Majapahit relative hidup rukun, aman, dan tenteram. (Hlm. 50).

Penjelasan diatas mencerminkan bahwa sekitar kurang lebih abad ke-12 di Nusantara, masyarakat dengan berbagai aliran agama sudah dapat hidup secara damai. Dilihat dari kalimat penulis diakhir “Masyarakat Majapahit relative hidup rukun, aman, dan tenteram” penulis secara implisit ingin menegaskan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan toleransi pada masa itu sudah tercipta dengan baik. Sikap-sikap menghargai keberagaman dari segi etnis dan budaya sudah banyak dipraktikkan oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia sehingga nilai-nilai tersebut harus diwariskan pada generasi sekarang demi terciptanya Indonesia yang damai.

Analisis Nilai-Nilai Multikulturalisme pada Materi-materi dalam buku teks sejarah SMA terbuka kelas XI

Nilai-nilai multikulturalisme juga tercermin dalam materi mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas XI khususnya pada materi Kesadaran Nasional Hingga Sumpah Pemuda. Materi Kesadaran nasional sarat akan nilai-nilai multikulturalisme, karena pada masa ini mulai munculnya kesadaran akan suatu bangsa yang berlatar pada keberagaman etnis, budaya, agama, dan unsur kedaerahan. Kesadaran akan keberagaman tersebut muncul karena didorong oleh kebutuhan untuk bersatu melawan penindasan penjajah. Sehingga multikultur yang sebelumnya dijadikan kelemahan oleh bangsa penjajah untuk memecah belah, tidak lagi berfungsi. Melainkan perbedaan tersebut dijadikan kekuatan untuk bersatu membentuk sebuah bangsa yang merdeka. Ini terlihat pada beberapa penggalan pada buku teks berikut ini “Tujuan Indische Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras” (Modul sejarah Indonesia SMA Terbuka kelas XI Halaman 60).

Dalam penggalan teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Indische Partij sebagai sebuah partai politik pertama di Indonesia sudah tidak lagi mengusung aspek agama seperti Serikat Islam, maupun sentiment kedaerahan seperti Jong Java maupun organisasi bersifat kedaerahan lainnya. Artinya partai tersebut membawa misi yang jauh lebih penting yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan mementingkan persatuan bagi setiap keragaman tersebut. Hal ini tercermin dari keanggotaannya yang bersipat terbuka, mau menerima siapapun dari golongan dan unsur manapun yang memiliki tujuan yang sama yakni bebas dari belenggu penjajahan.

Teks berikutnya yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme terdapat pada sub materi berikutnya seperti yang tertulis berikut ini

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 - 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu: 1. menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya; 2. menyatukan organisasi, arah,

serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 3. mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia (Modul Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Terbuka Halaman 61).

Teks tersebut menunjukkan bahwa sudah dilakukan usaha yang mengarah kepada persatuan yang lebih nyata. Perbedaan agama, etnis, kedaerahan yang menjadi ciri masyarakat multikultur sudah dilebur dalam satu wadah perhimpunan yang lebih fleksibel. Ini tampak dari tujuan perhimpunan tersebut yang ingin menghindari perselisihan diantara anggota-anggotanya yang berasal dari latar belakang yang beragam. Perselisihan bisa dihindari jika antara sesama anggotanya memiliki sikap keterbukaan dan penerimaan pada mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tentunya menanamkan sikap toleransi dengan cara menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian multikulturalisme dalam sebuah negara yang plural dan multikultur dapat terlaksana.

Melihat dari kutipan teks tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bangsa Indonesia memiliki track record yang tidak terlalu jelek dalam pengelolaan keanekaragaman sosial budaya. Karena sejarah perjuangan bangsa inipun banyak yang diwarnai dengan sikap toleransi. Mahfud (2016, hlm 80-81).

Selain itu terdapat sub materi lain yang bisa dijadikan sebagai bahan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, yaitu materi Sumpah Pemuda pada halaman 64-66. Pertama, terdapat pada teks berikut: “Kongres I tidak membawa hasil seperti yang di harapkan. Rasa kedaerahan masih kuat, sehingga upaya menyatukan organisasi pemuda belum berhasil. Namun demikian, tekad untuk menyatukan dan menggalang organisasi pemuda terus berjalan. Upaya tersebut akhirnya berhasil dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda II tahun 1928 (Modul Sejarah Indonesia Kelas XI semester I, hlm 64).” Pada teks tersebut sangat terlihat bahwa unsur etnik saat pertemuan Kongres Pemuda I bukan hal yang mudah bagi para pemuda yang hadir pada saat itu untuk menyamakan persepsi mengenai visi persatuan. Perbedaan bahasa dan kebudayaan suku-suku yang ada pada saat itu merupakan satu dari alasan mengapa Kongres Pemuda I tidak mencapai kemufakatan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan alasan bagi para pemuda yang hadir pada saat itu menghentikan dan menyerah dalam menghasilkan suatu kemufakatan. Hal ini terlihat dari hasil dari Kongres Pemuda I, yaitu sepakat dengan akan diadakannya pertemuan selanjutnya dalam Kongres Pemuda II.

Kedua, pada teks “Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan (Modul Sejarah Indonesia Kelas XI semester I, hlm 64).” Pada teks tersebut, Moehamad Yamin menyebutkan bahwa hukum adat merupakan salah satu dari lima faktor yang bisa memperkuat persatuan bangsa. Hukum adat sebagai kearifan lokal merupakan warisan kebijakan dan kebijaksanaan dari generasi bangsa terdahulu. Saat ini kearifan lokal merupakan salah satu penyaring globalisasi yang menyisipkan nilai-nilai asing dan budaya western yang masuk ke wilayah bangsa Indonesia. Sayangnya saat ini keraifan lokal yang seharusnya menjadi salah satu penyaring globalisasi yang negative justru ditinggalkan oleh generasi muda saat ini.

Selanjutnya, unsur multikulturalisme yang terlihat pada teks Sumpah Pemuda dibawah ini:

“Mengikrarkan Sumpah Pemuda, bunyinya:

- a. Pertama: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang satoe, tanah Indonesia;
- b. Kedoea: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe bangsa Indonesia;
- c. Ketiga: Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia (Modul Sejarah Indonesia Kelas XI semester I, hlm 65).”

Dalam teks sumpah pemuda diatas, yang sangat menonjol ialah bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam hal etnis, kebudayaan, serta bahasa. Akan tetapi, dalam teks diatas, dengan tidak menonjolkan latar belakang masing-masing, baik itu etnis, bahasa, agama, dan lain-lain) para pemuda berhasil mencapai kemufakatan dengan menghasilkan Teks Sumpah Pemuda. Bukan hal yang mudah bagi para pemuda saat itu untuk meleburkan latar belakang mereka agar mencapai kemufakatan persatuan.

Pembahasan dari Hasil Analisis

Analisis materi berfokus pada kehidupan pada masa awal kehidupan manusia di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Uraian dalam buku teks tersebut sudah terdapat beberapa bagian yang menekankan pada nilai-nilai multikulturalisme. Walaupun terdapat beberapa penjelasan yang memunculkan nilai multikulturalisme, namun hal ini masih kurang mengingat masih banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang dapat dimunculkan yang mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme. Contohnya pada deskripsi materi tentang Kerajaan Sriwijaya, dalam buku ini penulis hanya terpaku pada fakta-fakta umum terkait kerajaan tersebut. Penulis seharusnya menambahkan fakta bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang sudah memiliki hubungan baik dengan etnis-etnis lain seperti Cina, India dan Arab. Hubungan ini terjalin dengan baik karena perdagangan yang didukung oleh faktor hebatnya sistem kemaritima Kerajaan Sriwijaya. Bahkan hubungan tersebut memiliki pengaruh pada perkembangan budaya pada masa nya, dan sampai saat ini pengaruh tersebut masih dapat kita temui.

Fakta lain yang seharusnya juga dimunculkan ialah mengenai kerajaan Majapahit yang menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain seperti Siam, Birma, Kamboja, Anam, India, dan Cina. Dalam membina hubungan dengan luar negeri Majapahit mengenal motto *Mitrea Satata*, artinya negara sahabat. Namun yang dimunculkan dalam buku teks ini hanya mengenai fakta-fakta secara umum saja padahal nilai multikultural dalam segi etnis dan agama dalam fakta ini sangat kental.

Selain melalui fakta-fakta diatas, menurut Saripudin (2016, hlm. 830) nilai-nilai multikulturalisme juga dapat dimunculkan melalui suatu tokoh dalam sejarah. Contohnya dari tokoh Dr. Wahidi Sudirohusodo, yang termasuk kepada golongan terpelajar yang ingin mengubah pandangan yang bersifat kedaerahan menjadi pandangan nasional dan berpengaruh pada kemerdekaan. Sudah saatnya nilai-nilai multikulturalisme dimunculkan secara eksplisit dan mendalam pada buku teks sejarah. Sehingga siswa dapat secara utuh memahami sejarah sekaligus menyerap nilai-nilai tersebut. Karena dengan pembelajaran sejarah pada hakekatnya menurut Wiyanti (2012, hal.3) bahwa melalui pembelajaran sejarah siswa bukan hanya diberikan pengetahuan tetapi diajak untuk menelaah keterkaitan antara kehidupan mereka, masyarakat dan bangsanya, sehingga menjadikan siswa tumbuh menjadi generasi yang paham dan memiliki kesadaran akan sejarah, menjadikan kisah-kisah di masa lalu sebagai inspirasi yang pada akhirnya mendorong terbentuknya pola pikir ke arah rasional, kritis, empiris, dan memiliki sikap mau menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

SIMPULAN

Setelah menelaah secara mendalam buku teks sejarah SMA terbuka kelas X dan XI yang diterbitkan oleh Pemprov Jabar, para penulis menyimpulkan bahwa sudah terdapat beberapa nilai-nilai multikulturalisme yang muncul dalam beberapa bahasan materi. Hal-hal tersebut disampaikan hanya melalui peristiwa sejarah, sementara tidak ditemukan penyampaian nilai-nilai multikulturalisme melalui tokoh. Materi yang dianalisis ialah mengenai kehidupan awal nenek moyang bangsa di nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Dari uraian dalam buku teks tersebut terdapat beberapa paragraf yang secara eksplisit menekankan pada nilai-nilai multikulturalisme.

Selain itu juga para penulis menganalisis materi-materi pada buku teks kelas XI mengenai golongan tua dan muda kemudian sumpah pemuda. Dalam materi-materi ini juga terdapat nilai-nilai multikulturalisme yang tercemin secara implisit. Contohnya berubahnya orientasi organisasi-organisasi kedaerahan menjadi orientasi nasional. hal-hal tersebut merupakan bukti bahwa pemangku kebijakan dan penulis buku teks sejarah sudah sadar akan pentingnya dimasukan nilai-nilai toleransi terhadap kemultikulturalan Indonesia walaupun belum secara menyeluruh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, A. (2011). Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
 Horton, J. (2001). Liberalism, Multiculturalism, and Toleration. New York: Palgrave.
 Naim, N., & Sauqi, A. (2011). Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. AR-Ruzz Media.
 Mahfud, C. (2016). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Rustanto, B. (2015). Masyarakat Multikultural Indonesia. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Wineburg, S. (2000). Making Historical Sense In Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives. Edited by Peter N. Stearns, Peter Seixas and Sam Wineburg. New York: New York University Press.
- Ambarudin, Ibnu R. 2016. Pendidikan Multikultural untuk membangun bangsa yang Nasionalis Religius. *Jurnal Civics*, 13(1). 28-45
- Lionar, Uun. 2017. Identifikasi Nilai Multikulturalisme Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 26(1). 64-73.
- Mania, S. (2010). Implementasi Pendidikan multikultural dalam Pembelajaran. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 13, No.1, hlm.78-91.
- Rosyada, Dede. 2014. Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1). Hlm 1-12
- Sudrajat. (2014). Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi*. Vol.2, No.1, Hlm.82-90.
- Saripudin, D. & Komalasari, K. (2016). The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook. *American Journal of Applied Sciences*. Vol 13(6). P. 827.835.
- Sjamsuddin, H. (2000). Penulisan buku teks sejarah: Kriteria dan permasalahannya. *Historia*. J. Pendidikan Sejarah.
- Wiyanti, E. (2012). Model pembelajaran kontekstual dalam pengembangan Pembelajaran Sejarah. *Bahan Ajar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.